

Judul : BBM Subsidi tetap akan dibatasi
Tanggal : Selasa, 06 September 2022
Surat Kabar : Republika
Halaman : 1

BBM Subsidi Tetap akan Dibatasi

Meski harga sudah naik, potensi *shifting* ke Peralite tetap ada.

■ INTAN PRATIWI,
DESSY SUCIATI SAPUTRI

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemkeu) menyatakan, pemerintah akan tetap membatasi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) subsidi. Meski kenaikan harga jual sudah dilakukan, beban subsidi pada anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) akan tetap tinggi jika tanpa pembatasan konsumsi.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan, barang subsidi harus disalurkan ke masyarakat yang berhak. Oleh karena itu, pemerintah tetap berusaha agar penyaluran BBM subsidi lebih tepat sasaran dengan adanya upaya pembatasan.

Sampai saat ini, BBM subsidi, seperti Peralite dan solar, masih dijual bebas. Konsumsi BBM subsidi pun tetap berpotensi melebihi kuota yang ditetapkan pemerintah. Suahasil mengatakan, pemerintah masih menanggung selisih harga meski harga BBM sudah dinaikkan.

"Kita berusaha lebih tepat sasaran, misalnya mobil bagus jangan *donor* beli Peralite. Kalau kendaraan umum, kendaraan kecil, masih boleh. Ini akan diatur lebih lanjut," ujar Suahasil.

Realisasi pembatasan konsumsi BBM subsidi masih menunggu revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 141 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran BBM. Dalam revisi tersebut, kriteria kendaraan yang berhak membeli BBM bersubsidi akan ditetapkan.

Suahasil menyebut pemerintah

sudah mengajukan penambahan kuota BBM solar dan Peralite kepada DPR. Suahasil memerinci, pemerintah menambah kuota Peralite dari 23 juta kiloliter (KL) menjadi 29 juta KL. Sedangkan untuk solar, pemerintah mengajukan tambahan kuota dari 15 juta KL menjadi 17,4 juta kiloliter.

Jika tambahan kuota tersebut disetujui DPR, pemerintah akan menambah alokasi subsidi di APBN. Dengan penambahan kuota, beban APBN untuk subsidi BBM yang semula Rp 502 triliun naik menjadi Rp 698 triliun.

"Perhitungan tersebut sebelum kami memutuskan untuk menaikkan harga jual BBM. Kenaikan harga kemarin cukup mengurangi beban APBN yang tadinya kami perkirakan menjadi Rp 698 triliun, turun ke Rp 650 triliun," ujar Suahasil.

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Muhammad Faisal menilai pembatasan terhadap penyaluran BBM subsidi memang tetap perlu dilakukan. Justru, kata dia, perbaikan dalam penyaluran subsidi harus lebih dahulu dilakukan jika pemerintah ingin mengurangi beban subsidi BBM di APBN. "Jika tidak dibatasi maka beban APBN tetap akan tinggi. Apalagi, gap harga antara Pertamina dan Peralite masih besar," ujar Faisal kepada *Republika*, Senin (5/9).

Sebelum harga Peralite dinaikkan, jarak harga jual antara Pertamina dan Peralite sebesar Rp 4.350 per liter. Hal itu membuat masyarakat beralih ke Peralite. Saat ini, jarak harga antara Peralite dan Pertamina malah membe-

sar menjadi Rp 4.500 per liter setelah pemerintah memberi restu kepada Pertamina untuk menaikkan harga Pertamina dari Rp 12 ribu per liter ke Rp 14.500 per liter. Adapun harga Peralite naik menjadi Rp 10 ribu per liter.

"Potensi *shifting*-nya tetap ada. Mengingat saat itu yang membuat masyarakat berbondong ke Peralite karena salah satunya dipicu kenaikan harga Pertamina," ujar Faisal.

Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKS, Nurhasan Zaidi, mengatakan, kenaikan harga BBM dapat memicu tingginya kenaikan inflasi dan angka kemiskinan. Ia meminta pemerintah bekerja cepat untuk mencegah kenaikan harga barang dan jasa serta bertambahnya angka kemiskinan.

"Kita punya catatan bahwa paling tidak tujuh kali BBM naik di masa pemerintahan saat ini. Palingnya, kenaikan ini terjadi saat masyarakat baru akan bangkit

dari imbas pandemi. Bahkan, ancaman inflasi akibat kenaikan BBM pun sudah terlibat," kata Nurhasan, Senin (5/9).

Ia memahami, beban subsidi dan kompensasi energi terlampau besar. Namun, ia masih melihat banyak alternatif solusi yang dapat diambil untuk mengatasi permasalahan itu. Kenaikan harga BBM hingga 30 persen malah akan menjadi penyebab utama naiknya harga komoditas.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Karirubio memproyeksikan laju inflasi tahun ini sekitar 6,6 persen sampai 6,8 persen setelah adanya kenaikan harga BBM. Adapun proyeksi itu melebihi target pemerintah sebesar 4 persen hingga 4,8 persen.

"Kita sudah hitung, 1,9 persen dampaknya dari kenaikan BBM ke inflasi. Kisaran (tahun ini) inflasi akan ada 6,6 persen sampai 6,8 persen," ujarnya kepada wartawan, Senin (5/9).

Febrio mengatakan, pemerintah berupaya menjaga tingkat inflasi hingga akhir tahun agar mampu tetap di bawah 7 persen. Hal itu dilakukan dengan menjaga distribusi dan harga pangan.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wiratomo menyampaikan, pengalihan subsidi BBM memprioritaskan kelompok ekonomi rentan, yakni kelompok masyarakat miskin dan hampir miskin. Hal itu dilakukan untuk menahan peningkatan angka kemiskinan dan menjaga daya beli masyarakat di tengah kenaikan harga pangan dan energi.

■ *Nota: narasumber adalah ed: satra-kartika yudha*



Jokowi: Sampaikan dengan Cara yang Baik

Hlm-7



Baca juga di republika.id
Pindai QR Code ini